

Berita	: WTP Terganjai Penataan Aset
Entitas / Cakupan	: BPK
Sumber / Hal	: Galamedia / Ha.3
Edisi	: Selasa, 21 Agustus 2018

WTP Terganjai Penataan Aset

■ Oded, “Progresnya Bagus, Sekarang Tinggal Rp 1,1 T”

MERDEKA, (GM).-

Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial mendorong percepatan penuntasan masalah aset. Peralnya, persoalan aset menjadi salah satu kendala meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Pria yang akrab disapa Mang Oded itu mengatakan, sejak 2015 lalu, Kota Bandung mulai menangani persoalan yang terkait penataan aset pemerintah. Dalam mencari solusi, ia telah berkonsultasi dengan Pj. Gubernur Jawa Barat, M. Iriawan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa.

Hasil dari pertemuan tersebut, tim dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersedia membantu Kota

Bandung agar mampu memperoleh opini WTP.

“Saya mencoba komunikasi dan koordinasi dengan Sekda Jawa Barat sekaligus juga di depan Pj. Gubernur. Tentu ingin ada perbaikan tentang pengelolaan aset daerah, Alhamdulillah kemarin Pj. Gubernur dan Sekda merespon positif,” ungkap Oded saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung di eL Royal Hotel, Jln. Merdeka, Kota Bandung, Senin (20/8).

Untuk meraih penilaian WTP, kata Oded, ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan seperti piutang sewa hingga pendataan aset. Berdasarkan data yang dimilikinya, untuk pendataan aset dari semula Rp

11 triliun pada tahun 2015, kini sudah menyusut hingga Rp 1,1 triliun.

“Ini progresnya sudah cukup bagus. Sekarang tinggal yang Rp 1,1 triliun. Ini bisa menghasilkan tata keuangan yang baik dan akhirnya kita keluar dari persoalan semula WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menjadi WTP,” ujarnya.

Pj. Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dadang Supriatna menuturkan, pemkot tengah menangani sisa dari total keseluruhan aset yang dikecualikan oleh BPK. Pihaknya optimis tahun ini bisa menuntaskan itu semua.

“Ada tiga akun yang dikecualikan, yaitu piutang sewa tanah, kewajiban jangka pendek, dan aset tetap. Tapi memang yang paling signifikan adalah nilainya adalah aset,” terang-

nya.

Komitmen pimpinan SKPD

Pada kesempatan yang sama, Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa hadir langsung untuk memberikan paparan tentang cara Pemprov Jawa Barat memperoleh opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut. Ia mengajak seluruh pimpinan SKPD dan kewilayahan untuk turun tangan. “Kalau tidak turun tangan, tidak akan bisa WTP,” katanya.

Iwa menegaskan, komitmen pimpinan SKPD berperan penting dalam penilaian laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, koordinasi antar satuan SKPD juga menjadi kunci kesuksesan. “Satu lagi adalah komunikasi antar SKPD juga dengan tim BPK harus berjalan dengan baik,” tambahnya. (rio)**